

DEWAN INGATKAN SKPD TEMUAN BPK



bloq.propertykita.com

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) mengingatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)ⁱ yang menurut Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2013 terdapat temuan kerugian daerah. Hal ini diungkapkan salah satu Anggota Dewan, M Rahayaan dalam Rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)ⁱⁱ-Perubahan di Ruang Rapat DPRD Malra, belum lama ini.

Dalam pembahasan APBD-Perubahan itu, M Rahayaan yang merupakan Anggota Badan Anggaran sekaligus Ketua Komisi C DPRD Malra menyesalkan sejumlah temuanⁱⁱⁱ BPK di beberapa SKPD, salah satu temuan terbesar yaitu pada pengelolaan Pasar Tradisional Langgur. M Rahayaan menyatakan bahwa pihaknya telah membahas masalah Pasar Langgur dan terjadi perdebatan yang alot. Pihaknya juga telah mengingatkan dinas, untuk bersikap dalam pengelolaan pasar tersebut tetapi dinas takut dengan oknum-oknum di pasar dan hasilnya BPK memastikan adanya temuan.

Tidak saja pasar, Pengelolaan Retribusi Pelabuhan Kapal Motor Watdek pada Tahun 2011 melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni sebesar 300 persen membuat pemerintah kabupaten begitu semangat mengucurkan anggaran^{iv} untuk rehabilitasi pelabuhan. Namun, apa yang diperoleh, kini BPK menetapkan adanya temuan kerugian negara^v dalam penarikan retribusi tersebut.

Menurut M Rahayaan, pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur, juga ditemukan kerugian. Hal ini berarti terdapat kebocoran anggaran. M Rahayaan meminta SKPD untuk tidak takut terhadap oknum siapapun dan harus mengambil tindakan tegas. Disamping itu, dikemukakan bahwa pada beberapa titik galian C setelah dilakukan evaluasi, ditemukan adanya piutang sejumlah kontraktor atas galian tersebut sehingga hal ini perlu disikapi.

Politisi asal PAN itu juga menyesalkan pada Tahun 2011 lalu, dimana sebanyak 10 Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak^{vi} dan retribusi yang ditetapkan namun semuanya

tidak mencapai target. Dari 10 produk hukum yang dihasilkan, hanya Perda Pemakaman yang melebihi target PAD.

Sumber Berita :

Ambon Ekpress, 23 September 2014.

ⁱ **SKPD** adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

ⁱⁱ **APBD** adalah **1.** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD; **2.** suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

ⁱⁱⁱ **Temuan** adalah **1.** himpunan dan sintesis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan secara sistematis dan analitis meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; **2.** indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan lapangan.

^{iv} **Anggaran** adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

^v **Kerugian Negara** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai [vide: UU No. 15/2006, Psl 1 angka 15].

^{vi} **Pajak** adalah iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara, dan sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian.